



RENCANA KERJA TAHUN 2015

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2015



RENCANA KERJA TAHUN 2015

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia
2015**



Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 (Renja Ditjen PPKL 2015). Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 dan Rencana Kerja Ditjen. PPKL Tahun 2016.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2015 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2015 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara akuntabel.

Renja Ditjen PPKL Tahun 2015 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renja Ditjen PPKL Tahun 2015 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan Ditjen PPKL.

Jakarta, 23 November 2015

Dirjen Pengendalian Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan



M.R. Karliansyah



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Mekanisme Penyusunan	3
1.3. Program Tahun 2010 - 2014	3
1.4. Capaian IKU dan IKK Tahun 2014	5
1.5. Program Tahun 2015 – 2019	9
BAB II SASARAN STRATEGIS 2015	12
2.1. Sasaran Strategis Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	12
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015	19
3.1. Arah Kebijakan	19
3.2. Program Tahun 2015	19
3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2015	20
BAB VI PENUTUP	25
LAPMIRAN I	26
LAPMIRAN II	35

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014.....	5
Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 "Penurunan tingkat pencemaran lingkungan"	7
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 "Peningkatan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup"	8
Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup"	9
Tabel 5. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	13
Tabel 6. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4	26
Tabel 7. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4	26
Tabel 8. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4	27
Tabel 9. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4	27
Tabel 10. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3	27
Tabel 11. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 2/3	28
Tabel 12. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 3/3	28
Tabel 13. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4	29
Tabel 14. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 2/4	29
Tabel 15. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 3/4	29

Tabel 16. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 4/4	29
Tabel 17. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 1/5	30
Tabel 18. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 2/5	30
Tabel 19. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 3/5	31
Tabel 20. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 4/5	31
Tabel 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air : Sasaran Unit Kerja # 5/5	31
Tabel 22. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #1/5.....	32
Tabel 23. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #2/5.....	32
Tabel 24. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #3/5.....	32
Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #4/5.....	33
Tabel 26. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara : Sasaran Unit Kerja #5/5.....	33
Tabel 27. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3	34
Tabel 28. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3	34
Tabel 29. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3	34
Tabel 30. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan dan Tahapan Pencapaian Kegiatan serta Anggaran Tahun 2014	35

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram struktur indikator outcomes, Indikator Kinerja Utama, Indikator Program dan Indikator Sasaran	4
---	---



RENCANA KERJA TAHUN 2015

BAB I. Pendahuluan



BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2016 telah disusun dan ditetapkan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tanggal 9 November 2015 tentang Penjabaran pelaksanaan Renstra 2015-2019 secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk

mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2015 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2015 merupakan lanjutan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2010-2014 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2014 dihadapkan pada pencemaran air dan udara dari kegiatan industri, jasa, rumah tangga, transportasi serta kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir dan laut; potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan serta semakin meningkatnya dampak akibat fenomena perubahan iklim. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2015 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

1.2. Mekanisme Penyusunan

Penyusunan Renja Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada periode 2010-2014, arah kebijakan dan strategi Ditjen PPKL tahun 2015, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Perubahan struktur organisasi dan pengesahan anggaran yang efektif mulai berlaku pada pertengahan tahun ini, mempengaruhi perencanaan kerja di Ditjen PPKL. Penyusunan Renja Tahun 2015 dilakukan melalui rapat kerja teknis yang dilaksanakan secara intensif dengan direktorat-direktorat yang ada di Ditjen PPKL. Masing-masing direktorat melakukan rapat kerja teknis untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

1.3. Program Tahun 2010 – 2014

Sasaran prioritas nasional Tahun 2010-2014 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

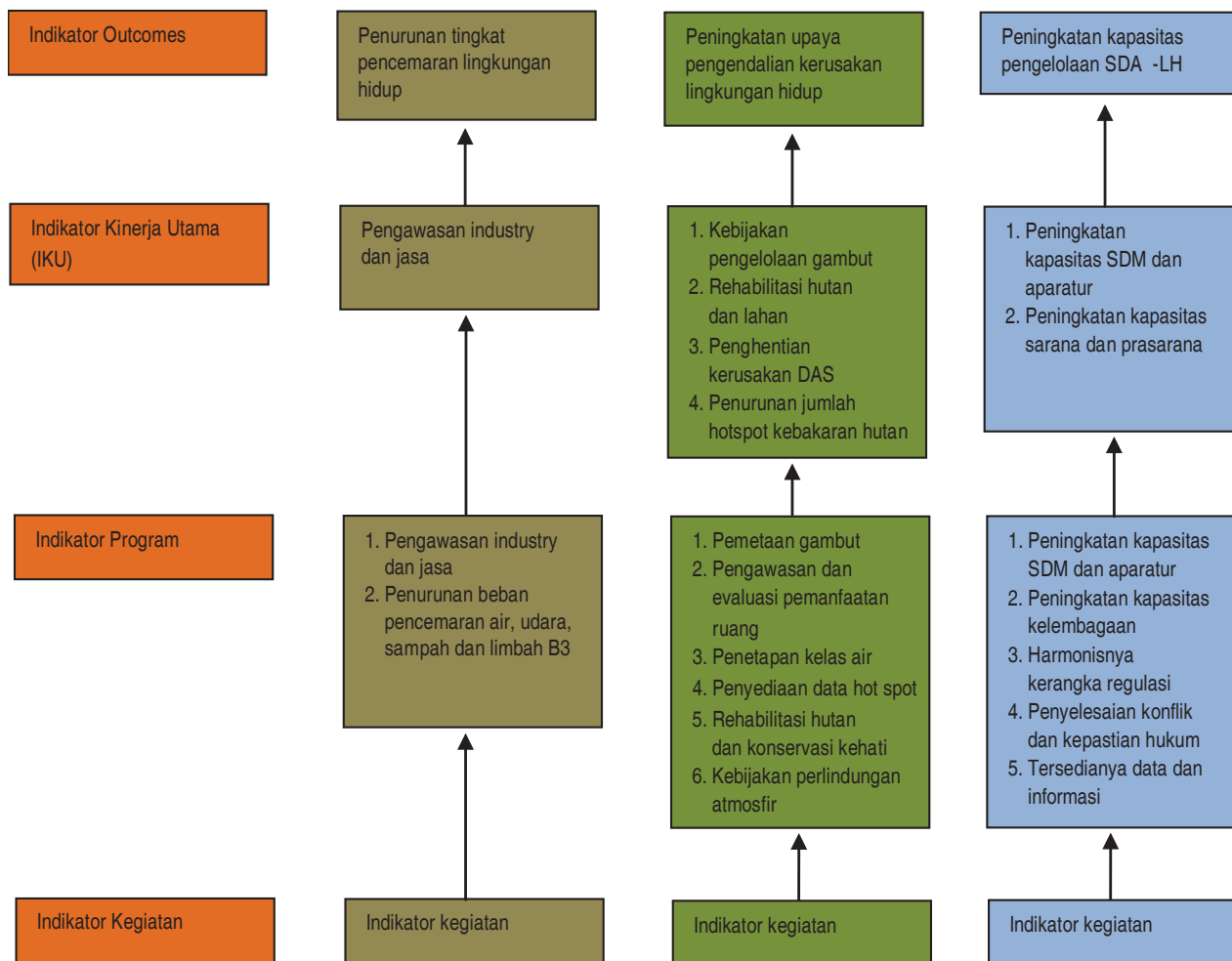
hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2010-2014 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran,
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan. Partisipasi masyarakat dan ketersediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, mengacu pada sasaran strategis yang terkait praktek tatakelola pemerintahan yang baik meliputi:

1. Pengelolaan keuangan kementerian; dan
2. Percepatan implementasi reformasi birokrasi

Indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari indikator-indikator kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pada Gambar 1 berikut ini. Evaluasi capaian kinerja disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



Gambar 1. Diagram struktur indikator outcomes, Indikator Kinerja Utama, Indikator Program dan Indikator Sasaran

1.4. Capaian IKU dan IKK Tahun 2014

1. Capaian IKU Tahun 2014

Realisasi pencapaian target-target IKU yang ditetapkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup	Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri	Prosentase	10	80,56	805,6
	Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Prosentase	65	72	110,7
	Prosentase peningkatan kinerja industri dari “tidak taat” ke “taat”	Prosentase	30	41	136,7
	Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik	Kota	45	45	100
	Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah	Prosentase	20	20	100
	Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir	Ton	10.005.500	19.089.566,53	191
	Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir	Ton	62.400	1.088.411,3	1.744
Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)	Kabupaten	200	200	100
	Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan	Provinsi	3	3	100
	Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion	Sungai	13	13	100
	Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau	Danau Prioritas	5	5	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Kasus	47	52	111
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Komunitas pendidikan dan organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	2.340 dan 1.018	2.895 dan 1.018	124 dan 100
	Prosentase laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi	Prosentase	29	29	100
	Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal	Prosentase	20	20	100
Pengelolaan Keuangan Kementerian	Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi B)	Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP	LAKIP	B	CC	

2. Capaian IKK Tahun 2014

Indikator Kinerja Utama diturunkan dalam bentuk yang lebih terukur ke dalam 17 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dibagi dalam 5 Sasaran Strategis, yaitu:

a. Menurunnya beban pencemaran lingkungan hidup

Indikator pencapaian sasaran menurunnya beban pencemaran lingkungan hidup adalah a) Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri ditargetkan 10%, terealisasi 80,56% atau tercapai 805,6% ; b) Prosentase jumlah yang taat terhadap peraturan

perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan ditargetkan 65%, terealisasi 72% atau tercapai 110,7%; c) Prosentase peningkatan kinerja industri dari “tidak taat” ke ‘taat” ditargetkan 30%, terealisasi 41% atau tercapai 136,7%; d) Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik ditargetkan 45 Kota, terealisasi 45 Kota atau tercapai 100%; e) Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah, ditargetkan 20%, terealisasi 20% atau tercapai 100%; f) jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir, ditargetkan 10.005.500 ton, terealisasi 193.087.703 atau tercapai 1.930%; g) Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari

kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir, ditargetkan 62.400 ton, terealisasi 243.857,54 ton atau tercapai 390%.

Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 "Penurunan tingkat pencemaran lingkungan"

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%	
	1	2		3		4	
a.	Prosentase penurunan pencemar yang ddibuang ke lingkungan oleh industri	10	%	80,56	%	805,6	%
b.	Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan	65	%	72	%	110,7	%
c.	Prosentase peningkatan kinerja industry dari "tidak taat" ke "taat"	30	%	41	%	136,7	%
d.	Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik	45	Kota	45	Kota	100	%
e.	Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah	20	%	20	%	20	%
f.	Jumlah limbah B3 terkelola dari industry yang terinventarisir	10.005.500	Ton	19.089.566,53	Ton	191	%
g.	Jumlah Limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir	62.400	Ton	1.088.411,3	Ton	1744	%

- b. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Indikator pencapaian sasaran meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup

adalah a) Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau), ditargetkan 200 Kabupaten, terealisasi 200 Kabupaten atau tercapai 100%; b) Jumlah provinsi yang

menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan, ditargetkan 3 Provinsi, terealisasi 3 Provinsi atau tercapai 100%; c) Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion, ditargetkan 13 sungai, terealisasi 13 sungai atau tercapai 100%; d) Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan

rencana aksi penyelamatan danau (Germadan), ditargetkan 5 danau, terealisasi 5 danau atau tercapai 100%.

*Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
"Peningkatan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup"*

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		%	
	1	2		3		4	
a.	Jumlah kabupaten yang meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)	200	Kabupaten	200	Kabupaten	100	%
b.	Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan	3	Provinsi	3	Provinsi	100	%
c.	Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion	13	Sungai	13	Sungai	100	%
d.	Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau (Germadan)	5	Danau	5	Danau	100	%

- c. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Indikator pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah a) Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani, ditargetkan 47 kasus, terealisasi 52 kasus atau tercapai 111%; b) Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi/ berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH, ditargetkan 2.340 komunitas pendidikan dan 1.018 organisasi masyarakat,

terealisasi 2.905 komunitas pendidikan (tercapai 124%) dan 1.018 organisasi masyarakat (tercapai 100%); c) Prosentase laboratorium lingkungan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi, ditargetkan 29%, terealisasi 29% atau tercapai 100%; d) Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, ditargetkan 20%, terealisasi 14% atau tercapai 31,28%.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
 "Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup"

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		REALISASI		%	
	1	2		3		4	
a.	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	47	Kasus	52	Kasus	111	%
b.	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/ berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH	2.340 dan 1.018	Komunitas Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	2.895 dan 1.018	Komunitas Pendidikan dan Organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	124 dan 100	%
c.	Prosentase laboratorium lingkungan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi	29	%	29	%	100	%
d.	Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional Pedal	20	%	14	%	31,28	%

d. Pengelolaan keuangan kementerian

Indikator pencapaian sasaran pengelolaan keuangan kementerian adalah Pengelolaan Keuangan Kementerian hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, ditargetkan WTP dan realisasinya WTP.

e. Percepatan implementasi reformasi birokrasi

Indikator pencapaian sasaran percepatan implementasi reformasi birokrasi adalah peningkatan kinerja kementerian lingkungan hidup berdasarkan penilaian LAKIP, ditargetkan B dan realisasinya CC.

1.5. Program Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis Ditjen PPKL Tahun 2015-2016 memuat tujuan yang ingin dicapai Ditjen PPKL Tahun 2015-2019 yaitu Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sasaran program Ditjen PPKL untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara;

2. Menurunnya beban pencemaran air;
3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut;
5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; dan
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL.

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PPKL seperti yang terdapat di dalam Renstra Ditjen PPKL Tahun 2015-2019.



RENCANA KERJA TAHUN 2015

BAB II. Sasaran Strategis Tahun 2015



BAB II. Sasaran Strategis Tahun 2015

2.1. Sasaran Strategis Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 7 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019	
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	
Misi Nasional	
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	
Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 - 2019	Peran Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019
Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.	1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; 2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered species</i>; 3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Tabel 5. Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam intensi strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tujuan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015 - 2019					
“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”					
Indikator Tujuan					
1. Tercapainya kualitas udara yang sehat 2. Tercapainya peningkatan kualitas air 3. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan 4. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut 5. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka 6. Terlaksananya reformasi birokrasi					
Sasaran Program					
1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Menurunnya beban pencemaran air; 3. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; 4. Menurunnya tingkat kerusakan gambut; 5. Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka; 6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.					
Sasaran Kegiatan					
UDARA: Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	AIR: Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BOD _e).	PESISIR LAUT: 1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015. 2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut.	GAMBUS Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan	LAHAN AKSES TERBUKA Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir	DUKUNGAN MANAJEMEN: Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019.

Sasaran Unit Kegiatan					
UDARA: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara; 2. Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara; 3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 4. Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak; 5. Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi.	AIR: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran air dalam upaya pencapaian menurunnya beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 2. Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 4. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air; 5. Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air.	PESISIR LAUT: 1. Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; 2. Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015; 3. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I; 4. Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II.	GAMBUS: 1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut; 2. Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan; 3. Efektivitas pengendalian kerusakan gambut.	LAHAN AKSES TERBUKA: 1. Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan; 2. Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama; 3. Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelebagaan pemangku kepentingan.	DUKUNGAN MANAJEMEN: 1. Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dansasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 2. Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana; 3. Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan; 4. Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat ditunjukkan dengan tabel di bawah ini :

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)			
		Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)	Indeks kualitas udara meningkat menjadi 84 di tahun 2019 (S1.P10.1.IKP)	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1)	Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1.IKK.a)
					Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10.K1.1.IKK.b)
					Jumlah Kota yang menerapkan “green transportation” sebanyak 45 kota (S1.P10.K1.1.IKK.c)
				d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.1.IKK.d)	
		Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)	Indeks kualitas air meningkat menjadi 55 di tahun 2019 (S1.P10.2.IKP)	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe) (S1.P10.2.K2.2)	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.2.K2.2.IKK.a)
					Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.2.K2.2.IKK.b)
					Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.2.K2.2.IKK.c)
					Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.2.K2.2.IKK.d)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)	Indeks tutupan lahan meningkat menjadi 62 di tahun 2019 (S1.P10.3)	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir (S1.P10.3.K4.3)	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.3.K4.3.IKK.a) Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014(S1.P10.3.K4.3.IKK.b)
				Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.3.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S1.P10.3.K6.IKK.a)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)			
		Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)	Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun (S3.P10.1.IKP)	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 (S3.P10.1.K3)	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S3.P10.1.K3.IKK.a)
				Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.2.K3)	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S3.P10.1.K3.IKK.b)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.IKP)	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3.P10.2.K5)	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2.K5.IKK.a)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM		KINERJA KEGIATAN	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
					Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S3.P10.2.K5.IKK.b)
					Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)
					Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.d)



RENCANA KERJA TAHUN 2015

BAB III. Program dan Kegiatan Tahun 2015



BAB III. Program dan Kegiatan Tahun 2015

3.1. Arah Kebijakan

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015-2019 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, pada tahun 2015 arah kebijakan yang dilakukan Ditjen. PPKL kepada reorganisasi dalam proses penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, adaptasi sistem dan persiapan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2015. Posisi rencana kerja ini merupakan instrumen untuk menginternalisasi sasaran program yang telah tersusun dalam rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Adapun beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditjen. PPKL dalam melaksanakan programnya diantaranya :

- Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM)
- memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan;
- mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- menyusun Inpres dan Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3.2. Program Tahun 2015

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa tugas yang perlu diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan dan mendukung terhadap sasaran strategis Kementerian dalam Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup, Ditjen. PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Dimana ketiga peran tersebut menjadi tanggung

jawab Direktorat Teknis pada Ditjen. PPKL. Adapun target untuk Indikator Kinerja Utama Ditjen. PPKL sebagai berikut :

PROGRAM	SASARAN	TARGET
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Kualitas Udara	81
	Meningkatnya Kualitas Air	52
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	59
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	7 Kawasan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut	50 Ha
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	71 poin

3.3. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2015

Dalam melaksanakan programnya, Ditjen. PPKL mempunyai beberapa kegiatan diantaranya :

a. Pembiayaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran udara

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014	Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014	3%	Beban emisi udara dari sektor industri turun dibanding basis data tahun 2014	4%	7 Sektor Industri	Rp. 18.552.251.000
	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota	-	Pembangunan peralatan pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu di sejumlah 45 kota	-		-
	Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	3 kota	Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation"	3 kota	Kota Solo, Palembang dan Jakarta	Rp. 1.501.000.000
	Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau)	3 kota	Jumlah kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	29 kota		Rp. 2.814.355.000

b. Pembiayaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe). 2015 : - 2016 : 5% 2017 : 20% 2018 : 25% 2019 : 30%	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	-	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk, tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	2 sungai	Sungai Citarum (DKI Jakarta) dan Ciliwung (DKI Jakarta dan Jawa Barat)	Rp. 3.524.143.000
	Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	-	Jumlah sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	3 sungai	Sungai Citarum (DKI Jakarta), Ciliwung (DKI Jakarta dan Jawa Barat) dan Cisadane (Jawa Barat dan Banten)	Rp. 1.356.228.000
	Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	-	Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli)	3 sungai	Sungai Citarum (DKI Jakarta), Ciliwung (DKI Jakarta dan Jawa Barat) dan Cisadane (Jawa Barat dan Banten)	Rp. 1.444.398.000
	Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar	1%	Beban Pencemaran Air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	1%		Rp. 16.666.665.000

c. Pembiayaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015. 2015 : - 2016 : 5% 2017 : 10% 2018 : 15% 2019 : 20%	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun	1 Kawasan pesisir (NCICD)	Kualitas air diperairan pantai pada 3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bali) meningkat setiap tahun	3 Kawasan pesisir (NCICD)	Teluk Benoa, Bali, teluk semarang, teluk jakarta	Rp. 3.789.040.000
	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	-	Jumlah pilot project IPAL perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	5 unit	b. Kota Banda Aceh c. Kec. Panarukan, Kab. Situbondo d. Kec. Jangkar, Kab. Situbondo e. Kec. Gebang, Kab. Cirebon f. Kec. Mundu, Kab. Cirebon	Rp. 6.282.822.000

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang	3 Kawasan	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada kawasan pesisir prioritas: pantai, lamun, terumbu karang	10 Kawasan	a. Pesisir dan Laut Kab. Halmahera Selatan - cancel b. Kota Banda Aceh c. Pasir Putih, Kab. Situbondo d. Kota Sabang e. Kepulauan Seribu f. Kab. Badung g. Pesisir dan Laut Kota Ambon h. Padang Lamun Kota Ambon i. Kab. Bintan j. Padang Lamun Kab. Halmahera Selatan	Rp. 7.996.440.000

d. Pembiayaan Kegiatan Pemulihan Lahan Akses Terbuka

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir. 2015 : - 2016 : 10% 2017 : 15% 2018 : 20% 2019 : 25%	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 Provinsi	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 Provinsi	Kalimantan Barat (Singkawang), Kalimantan Timur (Paser) Jawa Tengah (Boyolali)	Rp. 9.164.750.000
	Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014	5%	Luas lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata tahun 2010-2014	5%		Rp. 3.969.774.000

e. Pembiayaan Kegiatan Pengendalian Kerusakan Gambut

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan.	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya	-	Kawasan yang ditetapkan peta satuan hidrologis gambutnya, dari 4 juta Ha luas indikatif KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbar, Sumsel dan Sumut	5 KHG	1. KHG Sungai Kampar - Sungai Gaung, Kab. Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir.	Rp. 19.751.372.000

RENSTRA KLHK			KEGIATAN RKAKL 2015			
Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Output	Lokus	Anggaran
2015 : - 2016 : 75Ha 2017 : 200Ha 2018 : 300Ha 2019 : 500Ha	Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	-	Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung	-	2. KHG Sungai Gaung-Sungai Batang Tuaka Kab. Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir	Rp. 2.820.140.000
	Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-	Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-	3. KHG Pulau Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti	
	Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	-	Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	-	4. KHG Pulau Bengkalis, Kab. Bengkalis Provinsi Riau 5. KHG Sungai Kapuas, Sungai Terentang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	

f. Pembiayaan Dukungan Manajemen Ditjen. PPKL

NO	SASARAN	KEGIATAN	TARGET 2016	PAGU
I	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL			
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		Rp. 10.446.733.000
		SAKIP Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 71,00 (A) d	71	Rp. 7.701.834.000
		Layanan Perkantoran	12 bln	Rp. 2.744.899.000



RENCANA KERJA TAHUN 2015

BAB IV. Penutup



BAB IV. Penutup

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian melalui peran Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2015 oleh seluruh unit kerja yang ada di Ditjen. PPKL. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat Ditjen. PPKL dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen LAKIP.

Lampiran I

1. Matriks Kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2015

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen, Setditjen PPKL memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja.

Tabel 6. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)		
Sasaran Unit Kegiatan #1/4	:	Efektivitas perencanaan program dan evaluasi dalam mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, PK, RKAKL).		3 Dok	4 Dok
2.	Tersedianya dokumen pelaporan (Monev Triwulan, LKj, dan Laporan RENJA).		-	4 Lap
3.	Terselenggaranya layanan kehumasan, data dan informasi.		-	5 Publikasi
4.	Terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pemerintah.		-	100%

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	--	Level 1

Tabel 7. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)		
Sasaran Unit Kegiatan #2/4	:	Efektivitas layanan kepegawaian dan penataan organisasi tata laksana		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Penandatanganan Kontrak Kinerja (SKP) oleh SDM, peta jabatan dan peningkatan pembinaan kapasitas SDM		234 Pegawai	234 Pegawai
2.	Terselenggaranya bulan layanan administrasi kepegawaian		-	1 Laporan
3.	Terselenggaranya pelayanan dan pembinaan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan (PEDAL)		-	-

Tabel 8. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)	
Sasaran Unit Kegiatan #3/4	:	Efektivitas pelayanan umum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan keuangan, laporan barang milik negara dan persediaan secara tepat waktu dan berkualitas (Tingkat Eselon I, Tingkat UAKPA, Rekonsiliasi Tingkat UAKPA).	11 Laporan	11 Laporan
2.	Tingkat kepatuhan penyajian administrasi dan pelaporan keuangan.	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya petunjuk teknis layanan administrasi keuangan dan umum.	-	1 Juknis
4.	Terselenggaranya layanan umum, dukungan operasional dan tata naskah dinas elektronik.	1 Laporan	1 Laporan

Tabel 9. Sekretariat Ditjen PPKL : Sasaran Unit Kerja # 4/4

Unit Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)	
Sasaran Unit Kegiatan # 4/4	:	Efektivitas pembinaan hukum dan koordinasi administrasi kerjasama teknik dalam negeri dan luar negeri	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah rancangan peraturan dan rekapitulasi status layanan peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-	18 RaPer.

2.	Terselenggaranya sosialisasi peraturan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	-	--
3.	Jumlah perjanjian kerjasama teknik dan rekapitulasi layanan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	-	5 Kerjasama
4.	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi kerjasama teknik.	-	1 Laporan
5	Terselenggaranya kesekretariatan PROPER	2000 Perusahaan	2000 Perusahaan

b. Direktorat Pengendalian Gambut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Gambut memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 10. Direktorat Pengendalian Gambut : Sasaran Unit Kerja # 1/3

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut		
Sasaran Unit Kegiatan # 1/3	:	Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem Gambut		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya sebaran ekosistem gambut pada KHG Nasional skala 1:250.000		1 (peta indikatif)	1 (peta dan diskripsi final 673 KHG dengan luas indikatif 26.353.976 Ha)

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Tersedianya peta dan karakteristik ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	---	5 KHG
3.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi lindung ekosistem gambut skala 1:250.000	----	6.071.011 Ha (usulan)
4.	Tersedianya bahan penetapan indikatif fungsi budidaya ekosistem gambut skala 1:250.000	----	20.282.966 Ha (Usulan)
5.	Tersedianya bahan penetapan fungsi ekosistem gambut pada KHG skala 1:50.000	---	---
6.	Tersedianya Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut	---	2 laporan

*Tabel 11. Direktorat Pengendalian Gambut :
Sasaran Unit Kerja # 2/3*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/3	:	Efektivitas perencanaan pengendalian kerusakan gambut dalam upaya pencapaian meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Nasional	---	2 dokumen
2.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Propinsi	----	2 dokumen
3.	Tersedianya bahan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten	-----	1 dokumen

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Tersedianya bahan evaluasi rencana pengendalian kerusakan ekosistem gambut	---	1 dokumen

*Tabel 12. Direktorat Pengendalian Gambut :
Sasaran Unit Kerja # 3/3*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut	
Sasaran Unit Kegiatan # 3/3	:	Efektivitas pengendalian kerusakan gambut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya bahan pemantauan dan luasan lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	---	2 dokumen
2.	Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun	---	50 ha

*50 hektar dibiayai APBN dan dilakukan oleh KLHK, selebihnya partisipasi berbagai multi stakeholder

- c. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 13. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut: Sasaran Unit Kerja # 1/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 1/4	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		1 dokumen
2.	Jumlah kerjasama dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut		3 kerjasama
3.	Jumlah standar dan baku mutu lingkungan pesisir dan laut	3 baku kerusakan	3 evaluasi baku kerusakan
4.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	-	1 laporan

Tabel 14. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 2/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/4	:	Tersedianya data dan informasi tentang beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data sumber pencemar, volume beban pencemar dan tingkat kerusakan ekosistem pesisir dan laut		5 kawasan

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Inventarisasi kualitas lingkungan pesisir dan laut	-	2 kawasan
3.	Tersedianya status mutu air laut		2 Kawasan

Tabel 15. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja # 3/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 3/4	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah I	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		18 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut		-
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistem pesisirnya		6 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		2 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah I		3 unit

Tabel 16. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut : Sasaran Unit Kerja #4/4

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	
Sasaran Unit Kegiatan # 2/3	:	Efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut wilayah II	

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah konsep ijin pembuangan air limbah ke laut		5 ijin
2.	Terlaksananya pemantauan kualitas air laut di lokasi IPAL yang terbangun dan kegiatan /usaha yang memiliki ijin pembuangan air limbah ke laut		-
3.	Jumlah kawasan yang dipulihkan		4 kawasan
4.	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di wilayah 1		1 kawasan
5.	Terbangun dan beroperasinya IPAL di Wilayah II		-

d. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

*Tabel 17. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 1/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air
Sasaran Unit Kegiatan #2/5	:	Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya rencana kerja pengendalian pencemaran air		1 dok
2.	Tersedianya konsep kebijakan (pedoman, standar dan atau kriteria) pengendalian pencemaran air yang meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan ketanggap darurat pencemaran air		13
3.	Jumlah kerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi dan institusi lainnya) dalam rangka mendukung pengendalian pencemaran air dan penurunan beban pencemaran air		2
4.	Tersusunnya laporan kinerja tahunan pengendalian pencemaran air		1 Lap

*Tabel 18. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 2/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air		
Sasaran Unit Kegiatan #2/5	:	Efektivitas inventarisasi dan alokasi beban pencemaran dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya sarana pemantauan kualitas air secara kontinyu dan online pada 15 DAS prioritas			2 sungai
2.	Tersedianya perhitungan daya tampung beban pencemaran dan alokasi beban pencemaran			3 sungai
3.	Tersedianya status mutu air dan indek kualitas air		33 Provinsi	33 Provinsi

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terlaksanannya penerapan alokasi beban pencemaran dalam penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air di daerah		2 Kab/ota
5.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria kualitas air dalam pelaksanaan inventarisasi dan penetapan alokasi beban pencemaran		6

*Tabel 19. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 3/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air	
Sasaran Unit Kegiatan #3/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah industri dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Ekstraktif		927
2.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Pengolahan		817
3.	Terlaksanannya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari industri ekstraktif dan pengolahan		4 jenis industri
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sektor industri		-

*Tabel 20. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 4/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air	
Sasaran Unit Kegiatan #4/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah domestik dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		284
2.	Terlaksanannya pilot project penurunan beban pencemaran air limbah dari Kegiatan Prasarana dan Jasa		-
3.	Terbangunnya IPAL Domestik sebagai pilot project untuk penurunan beban pencemaran air limbah dan meningkatnya kualitas air		4 Kab/Kota (5 lokasi)
4.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber domestik		1

*Tabel 21. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air :
Sasaran Unit Kerja # 5/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Air	
Sasaran Unit Kegiatan #5/5	:	Efektivitas pengendalian pencemaran air limbah USK dan non institusi dalam upaya pencapaian penurunan beban pencemaran dan perbaikan kualitas air	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Ekstraktif		8 Kab/kota (8 lokasi)

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Terevaluasinya Kinerja Pengendalian Pencemaran Air dari Industri Pengolahan	-	-
3.	Tersedianya kajian teknis untuk penyusunan pedoman, standar dan atau kriteria pencegahan pencemaran dari sumber USK dan non Institusi		1

e. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki 5 (lima) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

*Tabel 22. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #1/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan #1/5	:	Efektivitas perencanaan pengendalian pencemaran udara dalam upaya pencapaian menurunnya beban emisi pencemaran udara	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya perencanaan pengendalian pencemaran udara	-	3 Dok

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Tersusunnya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengendalian pencemaran udara	-	-
3.	Tersedianya Baku Mutu Pengendalian Pencemaran Udara	-	1 Baku Mutu

*Tabel 23. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #2/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan #2/5	:	Efektifitas pelaksanaan inventarisasi emisi sumber pencemar dan pengelolaan kualitas udara	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data inventarisasi emisi dan perhitungan beban emisi di kab/kota dan 7 sektor industri serta pemutakhirannya	10 kota 30 perusahaan	1 kota 30 perusahaan
2.	Tersedianya Status Mutu Udara	33 prov	33 Prov
3.	Terlaksananya penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara (WPKU)	-	1 dokumen konsep

*Tabel 24. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #3/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan #3/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak	

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi darat	-	-
2.	Tersedianya pedoman pengendalian pencemaran udara sumber bergerak dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	-	3 dok
3.	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi darat	-	-
4.	Terpenuhinya baku mutu kualitas udara ambien perkotaan	26 Kota	29 Kota
5.	Evaluasi penerapan green transportasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari sektor transportasi udara, laut dan alat berat	-	-

*Tabel 25. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #4/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan #4/5	:	Meningkatkan efektivitas pengendalian pencemaran udara sumber bergerak	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya model penurunan beban pencemaran udara di 7 sektor	-	7 sektor
2.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Energi Migas dan Pertambangan		448 industri
3.	Terlaksananya evaluasi kinerja industri Manufaktur, Prasarana dan Jasa		1693 industri
4.	Tersedianya pedoman dan bahan masukan teknis penyusunan NSPK Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak		1 dok

*Tabel 26. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara :
Sasaran Unit Kerja #5/5*

Unit Kegiatan	:	Pengendalian Pencemaran Udara	
Sasaran Unit Kegiatan #5/5	:	Meningkatnya Efektivitas sistem pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu di 45 kota dan pengendalian pencemaran non institusi	
No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpetakannya lokasi penempatan dan pengembangan sistem jaringan AQMS di 45 kota	-	1 Dok. (45 kota)
2.	Terlaksananya pemasangan peralatan serta sistem jaringan AQMS dan terpublikasinya data kualitas udara ambiendi 45 kota	-	-
3.	Tersusunnya kajian strategis dan pedoman pengendalian pencemaran udara dalam ruangan dan gangguan	-	1 dok
4.	Memastikan terselenggaranya pengendalian pencemaran udara dalam ruangan pemukiman dan gangguan	-	-
5.	Tersedianya laporan pengendalian pencemaran udara	-	1 lap

f. Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

Sesuai dengan peran dan fungsi untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, Direktorat Pemulihan

Kerusakan Lahan Akses Terbuka memiliki 3 (tiga) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

Tabel 27. *Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #1/3*

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Sasaran Unit Kegiatan #1/3	:	Efektifitas perencanaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka dalam upaya pencapaian sasaran meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya rencana tata kelola pemulihan lahan akses terbuka			-
2.	Evaluasi pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka			-
3.	Tersedianya laporan pemulihan lahan akses terbuka		-	1 lap

Tabel 28. *Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #2/3*

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Sasaran Unit Kegiatan #2/3	:	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi lahan akses terbuka serta skema pelebagaan yang melibatkan pemangku kepentingan utama		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Tersedianya baseline data dan pemutakhiran data kerusakan			3 prov

No	Indikator Unit Kegiatan	Baseline 2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Tersedianya Indeks Tutupan Lahan		33 Prov
3.	Tersedianya pelebagaan pertambangan rakyat		3 prov

Tabel 29. *Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka : Sasaran Unit Kerja #3/3*

Unit Kegiatan	:	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka		
Sasaran Unit Kegiatan #3/3	:	Efektivitas pemulihan kerusakan lahan akses terbuka melalui peran serta hasil pelembagaan pemangku kepentingan		
No	Indikator Unit Kegiatan		Baseline 2014	2015
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Jumlah kabupaten /kota yang terfasilitasi pencegahan kerusakan lahan akses terbuka			-
2.	Luas lahan terfasilitasi pemulihan kerusakan lahan bekas pertambangan			5%
3.	Penilaian kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan			46

Lampiran II

Tabel 30. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan dan Tahapan Pencapaian Kegiatan serta Anggaran Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan hidup	Prosentase penurunan pencemar yang dibuang ke lingkungan oleh industri	Prosentase	10	80,56	805,6
	Prosentase industri yang taat terhadap peraturan perundangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan	Prosentase	65	72	110,7
	Prosentase peningkatan kinerja industri dari “tidak taat” ke “taat”	Prosentase	30	41	136,7
	Jumlah kota metropolitan dan kota besar dengan kualitas udara membaik	Kota	45	45	100
	Prosentase jumlah penurunan timbulan sampah	Prosentase	20	20	100
	Jumlah limbah B3 terkelola dari industri yang terinventarisir	Ton	10.005.500	19.089.566,53	191
	Jumlah limbah B3 di media yang terkelola dari kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi yang terinventarisir	Ton	62.400	1.088.411,3	1.744
Meningkatnya usaha pengendalian perusakan lingkungan hidup	Jumlah kabupaten meningkatkan dan atau mempertahankan tutupan vegetasi di wilayahnya (profil kabupaten hijau)	Kabupaten	200	200	100
	Jumlah provinsi yang menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan	Provinsi	3	3	100
	Jumlah sungai prioritas yang disepakati kelas airnya dengan pendekatan ekoregion	Sungai	13	13	100
	Jumlah danau prioritas yang telah dilakukan penyusunan rencana aksi penyelamatan danau	Danau Prioritas	5	5	100
Meningkatnya kapasitas pengelolaan SDA dan LH	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Kasus	47	52	111
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi/berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH	komunitas pendidikan dan organisasi Kemasyarakatan yang berpartisipasi	2.340 dan 1.018	2.895 dan 1.018	124 dan 100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prosentase laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dipersiapkan untuk proses akreditasi	Prosentase	29	29	100
	Prosentase peningkatan kapasitas pejabat fungsional pedal	Prosentase	20	20	100
Pengelolaan Keuangan Kementerian	Pengelolaan keuangan kementerian, hingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini	WTP	WTP	
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)	Peningkatan kinerja KLH berdasarkan nilai LAKIP	LAKIP	B	CC	



DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410 - INDONESIA
Website menlh : www.menlh.go.id